

# ANALISIS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

**Riska Oktafiana<sup>1</sup>, Fathiyani<sup>2</sup>, Musdalifah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Jurusan Tarbiya Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Kel. Panyula  
e-mail: [riskaoktafiana16@gmail.com](mailto:riskaoktafiana16@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurusan Tarbiya Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Kec. Cina  
e-mail: [fathiyani999@gmail.com](mailto:fathiyani999@gmail.com)

<sup>3</sup> Jurusan Tarbiya Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Kec. Tellu Siattinge  
e-mail: [dalifahmusdalifah76@gmail.com](mailto:dalifahmusdalifah76@gmail.com)

## ABSTRACT

*To maintain teachers who have the ability and good talent in the learning process should be given welfare, compensation. The welfare provided is very meaningful and beneficial to meet the physical and mental needs of a teacher and his family. Efforts are made to maintain and improve the physical and mental condition of a teacher so that morale increases and can improve the quality of education through teacher welfare programs that are based on legal regulations, based on fairness and eligibility and based on government regulations. As for the forms of teacher welfare in the form of salaries, both basic salary and additional salary in the form of allowances. This study aims to determine how the influence of teacher welfare on improving the quality of education. this type of research used in this study is a qualitative research with a descriptive approach study document approach/ text*

**Keywords:** *policy, welfare, teacher, quality*

## ABSTRAK

*Untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan dan bakat yang baik dalam proses belajar hendaknya diberikan kesejahteraan, kompensasi. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental seorang guru beserta keluarganya. Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental seorang guru agar semangat kerja meningkat dan mapun meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui program kesejahteraan guru yang disusun berdasarkan peraturan legal, berdasarkan keadilan dan kelayakan serta berpedoman pada peraturan pemerintah. Adapun bentuk-bentuk kesejahteraan guru berupa gaji, baik gaji pokok maupun gaji tambahan yang berbentuk tunjangan-tunjangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesejahteraan guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pendekatan study dokumen/ teks*

**Kata Kunci:** *kebijakan, kesejahteraan, guru, kualitas*

## **PENDAHULUAN**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang keras seperti saat ini seseorang sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tetapi kita juga ketahui dalam persaingan dunia pekerjaan sangat ketat karena setiap orang ingin mempunyai pekerjaan yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup baik untuk masa sekarang atau bahkan untuk kehidupan yang akan datang.

Dalam pekerjaan sangat banyak mengandung aspek-aspek yang menimbulkan ketidakpuasan maupun kepuasan yang menjadi landasan dalam menjalani suatu pekerjaan tersebut. Ketidakpuasan itu tidak hanya ditentukan oleh sifat pekerjaan akan tetapi juga bergantung pada orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Tiap orang ingin mencari kepuasan dalam setiap pekerjaannya, akan tetapi tidak selalu kepuasan diperoleh karena ada pasti yang menghalanginya. Ketidakpuasan timbul sebagai akibat hambatan untuk mencapai kepuasan yang dicari individu dari kedudukannya. Sifat ketidakpuasan itu bergantung pada apa yang ingin dicapai seseorang dalam pekerjaannya atau keterlibatannya dalam pekerjaan itu. Kepuasan yang dicari oleh individu berbeda-beda. Pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan kepada seseorang yang belum tentu akan memberi kepuasan terhadap orang lain.

Menurut Davis mengatakan pada suatu tahapan kehidupan, individu-individu sebagai subyek dalam organisasi kerja, akan menemui dan dihadapkan pada berbagai ragam masalah yang menyangkut dan berkisar tentang kerja dan pekerjaan. Bermula dengan keinginan bekerja, lalu memilih pekerjaan, mempertimbangkan karir di masa mendatang, kemudian menentukan sikap dalam tugas-tugas pekerjaan, mengadaptasi lingkungan kerja termasuk dinamika organisasi kerjanya dan kemungkinan untuk berganti pekerjaan atau promosi, serta meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja. Hal lain yang mungkin pula dihadapi adalah masalah kesulitan hambatan dalam kerja dan atau kebutuhan untuk memperoleh imbalan serta penghargaan (reward) dalam pekerjaan.<sup>1</sup>

Permasalahan-permasalahan tersebut muncul ke permukaan karena individu-individu dalam aktivitas kerjanya memiliki tujuan dan menyanggah aspek-aspek pribadi (seperti kebutuhan, aspirasi, sikap, minat dan kemampuan) yang senantiasa berproses dan berinteraksi dengan perubahan dan perkembangan lingkungan organisasi kerjanya.

---

<sup>1</sup> Tjiptono, Fandy "*Manajemen Jasa*" (Edisi I Cet II, Andi Offcet : Yogyakarta, 1995), h. 30

Demikian hal dengan seorang guru, tentunya juga menghadapi permasalahan-permasalahan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Banyaknya masalah yang dihadapi oleh para guru akan menjadi sumber ketidakpuasan terhadap aktivitas kerjanya.

Guru tidak akan meninggalkan profesi mereka hanya karena berbagai faktor penyebab ketidakpuasan sebagaimana di atas. Biasanya mereka meninggalkan profesi guru karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dalam hal materi.

Dewasa ini tingkat kesejahteraan guru masih tergolong rendah, tidak setara dengan pengabdian yang diberikannya. Gaji merupakan aspek utama dan paling pokok dalam kesejahteraan seorang guru. Selain gaji, kesejahteraan guru juga meliputi kelancaran dalam kenaikan pangkat, kepastian karir sebagai guru dan hubungan antar pribadi.<sup>2</sup>

Secara hakiki sejahtera tidak dapat diukur, sejahtera berarti terpenuhi semua kebutuhan lahir maupun batin, sandang, pangan dan papan. Dahulu orang sudah dapat makan pagi dan malam dan rumah serta pakaian seadanya sudah boleh dikatakan sejahtera. Lain hal dengan sekarang, ukuran sejahtera sudah berubah polanya. Tidak hanya cukup sandang, pangan dan papan, akan tetapi lebih dari itu. Semua orang perlu kesejahteraan, demikian pula guru yang kesehariannya bergumul dan terikat dengan waktu dan tempat. Sebutan mulia yang sudah tersandang dipundak masing-masing sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bekerja keras tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin, lelaki atau perempuan, anak pejabat atau tidak, yang jelas semua anak didik dan dibinanya agar menjadi anak yang cerdas, berkualitas dan bertanggung jawab. Dengan tanggung jawab, moral yang dipercayakan negara kepada mereka sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa guru bertanggungjawab untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kesejahteraan guru menjadi jantungnya pelayanan pendidikan, karena dengan sistem insentif yang wajar dan berkeadilan dapat diharapkan suatu komitmen guru untuk memberikan pelayanan optimal dan terbaik bagi masyarakat. Tampaknya dari aspek tersebut mungkin belum dapat terwujud sepenuhnya dalam lingkungan kehidupan guru masa kini.

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini

---

<sup>2</sup> A. Supriyanto, 'Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Daerah Diseminasi', *jurnal ilmu pendidikan*(1997),4.(4) <<https://www.researchgate.net/publication/307685325>>

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi dokumen/teks. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi yakni meneliti dokumen-dokumen dalam bentuk buku-buku, literature-literatur maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ditulis dalam jurnal ini. Adapun tujuan studi dokumen atau teks yaitu untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami bagaimana peningkatan kinerja guru. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***1. Pengertian dan Hakikat Kebijakan Pendidikan***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.<sup>3</sup>

Menurut Nichols, bahwa : “kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy, bahwa : “kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi”.<sup>4</sup>

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

#### 1) Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

#### 2) Memenuhi aspek legal-formal

---

<sup>3</sup> \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, ed.3, cet.1, Jakarta : Balai Pustaka, h. 149

<sup>4</sup> Prof. Dr. Fachruddin, M.A. dkk, *Administrasi Pendidikan : Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam*, 2010, Bandung : Citapustaka Media Perintis, h. 146

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3) Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4) Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5) Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

6) Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktof yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan

harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.<sup>5</sup>

## **2. Kesejahteraan Guru**

Kesejahteraan secara umum ialah tercukupinya semua kebutuhan hidup. Kesejahteraan dibagi menjadi dua, yakni kesejahteraan material dan non material. Material adalah uang atau benda berharga dengan kata lain kekayaan secara fisik. Sedangkan non aterial ialah tercukupinya kebutuhan rohani, seperti kasih sayang, aman, ketenangan, dan sebagainya.

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>6</sup>

kesejahteraan guru merupakan kesejahteraan materiil (uang) dan non material yang diperoleh dari hasil berprofesi menjadi guru. Kesejahteraan adalah hal penting bagi guru, sebab dengan kesejahteraan yang memadai dapat diharapkan banyak pada guru dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajarnya, di samping tentu saja kemampuan profesionalnya, atau bahasa lainnya jika disediakan fasilitasi profesi maka guru akan termotivasi mengembangkan profesionalismenya.

Usaha yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan guru, pemerintah atau sekolah (Yayasan) harus memperbaiki dan mengusahakan hal-hal seperti :

- 1) Kepala sekolah hendaknya berusaha agar setiap anggota pegawai merasa dirinya diterima dan diakui.
- 2) Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menolong anggota stafnya agar memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.
- 3) Kepala sekolah hendaknya berusaha menghargai setiap usaha atau ide-ide yang muncul diantara stafnya.
- 4) Kepala sekolah berusaha mengikutsertakan stafnya dalam penentuan kebijaksanaan.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam pekerjaannya adalah dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan mereka. Hal tersebut penting dilakukan melalui pendidikan pra jabatan maupun dalam jabatan, tetapi menurut berbagai hasil studi itu saja tidak cukup, bahkan tidak begitu besa artinya jika tidak dilakukan usaha untuk terjadinya kolaborasi (perpaduan) antara para guru sehingga terjadi berbagai pengalaman.

## **3. Kualitas Pendidikan**

---

<sup>5</sup> Imron, Ali, *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, 2008, Jakarta: Bumi Aksara, h. 23

<sup>6</sup>Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang Guru dan Dosen* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 3

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam kamus modern Bahasa Indonesia adalah “kualitet”: “mutu, baik buruknya barang”<sup>7</sup> seperti halnya yang dikutip oleh Quraish shihab yang mengartikan kualitas sebagai tingkat baik buruk sesua atau mutu sesuatu.<sup>8</sup>

Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau keamanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. Menurut Suranta kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang dikerjakan dengan baik<sup>9</sup> sebagaimana yang telah di paparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.<sup>10</sup>

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.

Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, EBTA atau UN. Dapat pula

---

<sup>7</sup> M. Dahlan Al Barry, “*Kamus Modern Bahasa Indonesia*”, (Arloka : Yogyakarta, 2001) h.329.

<sup>8</sup> Quraish Shihab, “*membumikan Al-Qur’an*”, (Mizan : Bandung , 1999) h. 280

<sup>9</sup> . A. Supriyanto,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Daerah Diseminasi*”, November 1997, Jilid 4, IKIP, 1997 h. 225

<sup>10</sup> Tjiptono, Fandy “*Manajemen Jasa*” (Edisi I Cet II, Andi Offcet : Yogyakarta, 1995), h. 51

prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya.<sup>11</sup> Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan factor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.

#### ***4. Kebijakan Kesejahteraan guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan***

Dalam mengejar penjaminan mutu dalam proses transformasi di dalam system sekolah, Ayeni memandang sekolah sebagai system terbuka yang mengoprasikan jaringan hubungan antar individu dan kegiatan di dalamnya, dan dengan lingkungan eksternal, terutama para pemangku kepentingan yang merumuskan kebijakan nasional pendidikan yang menetapkan tujuan dan prosedur operasional untuk administrasi sekolah dan pelaksanaan kurikulum. Dalam upaya menerjemahkan tujuan pendidikan menjadi kenyataan, kepala sekolah memberikan umpan balik yang akurat pada kegiatan sekolah ke komite manajemen berbasis sekolah dan mencari masukan dalam bentuk pendapat ahli, dan dukungan yang relevan seperti sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan material untuk menjembatangi kesenjangan yang teridentifikasi di dalam proses belajar mengajar, mempromodikan akuntabilitas public dan penggunaan sumber daya yang di sediakan terhadap pengembangan kualitas potensi peserta didik.<sup>12</sup>

Kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi semua pegawai maupun guru, pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, meningkatkan sikap loyalitas guru terhadap sekolah. Untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan danbakat

---

<sup>11</sup>. Ace Suryadi dan H.A.R "Tilaar Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar" (PT.Remaja Rosdakarya: Bandung, 1993),h. 159.

<sup>12</sup>. A.Suhardi, peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS, *Adaraa jurnal manajemen pendidikan islam*,8.1 (2019), 374-385 <https://doi.org/ajmpi.v8i1.422>.

yang baik dalam proses belajar hendaknya diberikan kesejahteraan, kompensasi. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental seorang guru beserta keluarganya. Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental seorang guru agar semangat kerja meningkat dan mapun meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui program kesejahteraan guru yang disusun berdasarkan peraturan legal, berdasarkan keadilan dan kelayakan serta berpedoman pada peraturan pemerintah.

Tujuan pemberian kesejahteraan ada 3, yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial

Tujuan kesejahteraan ini berakar dari gagasan ideal demokratis mengenai keadilan sosial dimana hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

b. Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial

Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok guru yang tidak diuntungkan, kekurangan atau tidak terpenuhi kebutuhannya dapat melakukan serangan terhadap guru yang mapan. Oleh karena itu, kelompok guru tersebut harus berupaya untuk mengamankan diri dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan yang sudah berjalan.

c. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada usaha menjaga, meningkatkan harkat dan martabat guru di masyarakat serta untuk meningkatkan produktifitas guru dalam mengajar. Kesejahteraan sangat penting bagi guru, sebab dengan hal tersebut dapat meningkatkan produktifitas baik hidupnya atau produktivitas pendidikan.<sup>13</sup>

Adapun bentuk-bentuk kesejahteraan guru berupa gaji, baik gaji pokok maupun gaji tambahan yang berbentuk tunjangan-tunjangan. Selain itu, guru juga mendapatkan uang dinas, seperti uang rapat, uang membuat soal, mengoreksi soal, uang membuat rapot/semester, uang rapat, dan uang jika ada tugas dari sekolah, seperti rapat dinas di luar sekolah ataupun ada tugas lain seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), penataran guru, dan ada lagi uang tunjangan jabatan khusus kepala sekolah. Gaji pokok guru besarnya bervariasi menurut kelompok dan golongan. Menurut kelompok yang dimaksud adalah pengelompokan guru dari siapa pihak yang menggaji, yaitu: guru pegawai negeri (PNS), guru honorer daerah (PHD), guru kontrak, dan guru swasta atau wiyata bakti. Untuk guru pegawai negeri (PNS), gaji diterima dari pemerintah pusat besarnya menurut golongan dan lama mengajar. Dengan kisaran nominal Rp. 800.000,-sampai Rp. 2.000.000,.

---

<sup>13</sup>Umaedi, " *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Direktur Pendidikan Menengah dan Umum, April, 1999), h. 4.

Untuk gaji guru honorer daerah (PHD) gaji diberikan oleh pemerintah daerah (kabupaten masing-masing) dan guru kontrak gaji diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan gaji Rp 710.000,- setiap bulan.<sup>14</sup> Sedangkan guru swasta, pihak yang membayar tenaga guru adalah sekolah dari SPP siswa, besarnya bervariasi tiap jamnya tergantung besar-kecilnya sekolah, antara kisaran Rp. 10.000/jam sampai Rp. 20.000/jam, tapi sekarang guru swasta juga mendapatkan tunjangan dari pemerintah pusat berbentuk uang BKG (bantuan kesejahteraan guru) sebesar Rp. 1.200.000/tahun, namun tidak semua guru mendapatkan, sehingga akhirnya kadang uang tersebut dibagi rata kepada semua guru. Ada juga pemerintah daerah (tidak semua pemerintah daerah) yang memberikan subsidi perbulan kepada guru swasta yang jumlahnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain, berkisar Rp. 50.000,- /guru. Dan yang paling menyentuh hati adalah masih banyak guru swasta yang digaji pihak sekolah terutama madrasah-madrasah antara Rp. 50.000,-sampai Rp. 300.000,-.

Perbedaan lainnya ialah hanya guru negeri yang mendapatkan layanan berupa uang jaminan kesehatan dalam bentuk Jamsostek dan mendapatkan dana pensiun setelah usia masa kerja berakhir, sedangkan guru PHD, kontrak dan swasta tidak mendapatkan. Permasalahan lain yang perlu dicatat adalah betapa besar ketimpangan gaji/kesejahteraan/fasilitas yang diperoleh guru swasta, kontrak, maupun PHD dengan guru PNS, dan tentunya ini menimbulkan kecemburuan yang tidak sedikit, dengan alasan guru swasta mempunyai tugas yang sama yaitu: mendidik siswa, mengajar, dan ikut membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa, tetapi nasib mereka belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Adapun yang diperlukan dalam kesejahteraan pribadi dan profesional guru yang meliputi, a) Imbal jasa yang wajar dan proporsional, b) Rasa aman dalam melaksanakan tugasnya, c) Kondisi kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan suasana kehidupannya, d) Hubungan antarpribadi yang baik dan kondusif, e) Kepastian jenjang karier dalam menuju masa depan yang lebih baik.

Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan khususnya di Indonesia, yaitu :

a. Faktor internal

Faktor ini meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.

b. Faktor Eksternal

---

<sup>14</sup>Isbandi Rukminto. *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial Dasar-dasar Pemikiran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1994) h.8-9.

<sup>15</sup>Ibid.,hlm. 163.

Faktor ini adalah masyarakat pada umumnya. Dimana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidika.<sup>16</sup>

Tetapi banyak factor yang menyebabkan kualitas pendidikan di indonesai semakin terpuruk, seperti rendahnya kesejahteraan guru. Rendaahnya kesejahteraan guru mempengaruhi peran dalm membuat kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei FGII(Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar Rp. 3.000.000. 000,00. Sekarang pendapatan rata-rata guru perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,00. Guru bantu Rp. 460.000,00 dan guru honorer di sekolah swasta rta-rata Rp. 10.000,00 perjam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja banyak guru-guru yang melakukan pekejaan sampingan. Ada yang menagajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Selain itu kesenjangan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalh kesejahteraan guru masih sulit mencapai taraf ideal.

Peranan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap masalah tersebut yaitu Rendanya kesejahteraan guru sangat berkaitan dengan rendahnya kualitas guru dan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah sendiri telah menjalankan program sertifikasi guru yang sasarannya adalah semua Pegawai Negei Sipil lebih khususnya adalah guru. Sertifikasi ini tidak dilaksanakan dengan serentak namun secara berkala dengan maksud, guu yang pengangkatannya lebih lama mendaapat giliran terlebih dahulu dan selanjutnya guru-guu lainnya. Denagn diadakannya sertifikasi ini, kesejahteraan guru pun akan meningkat seklaigus kualitas mereka juga akan meningkat. Karena bagi guru yang tidaak lulus sertifikasi, akan diberikan diklat atau semacam pelatihan yang pada akhirnya akan lulus, tujuan dari diklat itu adalah memberikan bekal agar kualitas guru saat kembali mengajar semakin meningkat.

Kesejahteraan guru menjadi hal yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di indonesia karena suatu hal yang penting daan berpengaruh jika kesejahteraan seorang guru belum terpenuhi, kemungkinan besar akan sulit bagi guru untuk menyampaikan pelajaran terhadap peserta didik dengan optimal karena bisa saja motivasi seorang guru untuk mentransfer ilmu menjaddi berkurang. Dan konsentrasi guru pun lebih mengara terhadap bagaimana cara ia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ushawatun Chasana hasil wawancara dengan Bpk Kepala MI NU AlAzhariyah Jurang pada tanggal 10 Maret 2014 .

<sup>17</sup>Pendidikan Dasar, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pendidikan Di Indonesia*, 20 juni 2020. <http://mynewblogpendidikandasar.blogspot.com/2016/07/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas.html?m=1>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi semua pegawai maupun guru, pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, meningkatkan sikap loyalitas guru terhadap sekolah. Untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan dan bakat yang baik dalam proses belajar hendaknya diberikan kesejahteraan, kompensasi. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental seorang guru beserta keluarganya. Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental seorang guru agar semangat kerja meningkat dan maupun meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui program kesejahteraan guru yang disusun berdasarkan peraturan legal, berdasarkan keadilan dan kelayakan serta berpedoman pada peraturan pemerintah.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru terutama guru berstatus honorer yang kerap kali tidak mendapatkan kehidupan yang layak sehingga kualitas pendidikan pun dapat terus meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, ed.3, cet.1, Jakarta : Balai Pustaka,
- Ace Suryadi dan H.A.R (1993) "*Tilaar Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*"  
PT.Remaja Rosdakarya: Bandung
- A. Supriyanto, 'Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Daerah Diseminasi', *jurnal ilmu pendidikan*(1997),4.(4) < <https://www.researchgate.net/publication/307685325>>
- A.Suhardi, peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS, *Adaraa jurnal manajemen pendidikan islam*,8.1 (2019), 374-385 <https://doi.org/ajmpi.v8il.422>.
- Ace Suryadi dan H.A.R (1993) "*Tilaar Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*"  
PT.Remaja Rosdakarya: Bandung
- Imron, Ali,(2010) *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, , Jakarta: Bumi Aksara.
- Isbandi Rukminto(1993). *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial Dasar-dasar Pemikiran* Jakarta : PT. Raja Grafindo
- M. Dahlan Al Barry(2001), "*Kamus Modern Bahasa Indonesia*", Arloka : Yogyakarta.
- Pendidikan Dasar, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pendidikan Di Indonesia*,20 juni 2020. <http://mynewblogpendidikandasar.blogspot.com/2016/07/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas.html?m=1>
- Pemerintahan Republik Indonesia(2009), *Undang-Undang Guru dan Dosen* Jakarta : Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Fachruddin, M.A. dkk,(2010) *Administrasi Pendidikan : Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam*, , Bandung : Citapustaka Media Perintis

Quraish Shihab(1999), “*membumikan Al-Qur’an*”, Mizan : Bandung

Tjiptono(1995), Fandy *Manajemen Jasa* Edisi I Cet II, Andi Offcet : Yogyakarta

Umaedi,(1999) ” *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Direktur Pendidikan Menengah dan Umum.

Ushawatun Chasana hasil wawancara dengan Bpk Kepala MI NU AlAzhariyah Jurang pada tanggal 10 Maret 2014 .